

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dampak covid-19 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 tidak berjalan dengan baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun 2020 mengalami penurunan akibat covid-19. Setiap sektor penerimaan secara keseluruhan mengalami penurunan. Perbandingan penerimaan dari setiap sektor sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 (sebelum menyebarnya covid-19) dan tahun 2020 (selama covid-19) terlihat jelas bahwa realisasi penerimaan setiap sumber penerimaan pada tahun sebelum menyebarnya covid-19 di Kabupaten Manggarai Barat lebih baik dibandingkan penerimaan setelah masuk dan menyebarnya covid-19 di Kabupaten Manggarai Barat.
2. Sektor pajak daerah yang dinilai paling potensial dan merupakan andalan penerimaan daerah Kabupaten Manggarai Barat selama covid-19 tahun 2020 sangat diluar perkiraan. Sub pajak potensial seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan mengalami penurunan selama covid-19 ditahun 2020. Begitupun sub pajak dan begitupun pada sektor

penerimaan seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah..

Adapun dampak covid-19 ini yang menyebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat ditahun 2020 yaitu

- a) Destinasi wisata Kabupaten Manggarai Barat ditutup hingga akhir tahun 2020. Akibatnya tidak ada para wisatawan lokal maupun asing yang masuk sehingga berdampak pada merosotnya pemasukan hotel, restoran, dan tempat hiburan. Melihat pemasukan hotel, restoran, dan tempat hiburan mengalami penurunan, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan kebijakan dimana ketiga sub pajak tersebut bebas pajak selama empat bulan.
- b) Kemudian kebijakan pemerintah untuk menekan dan mengurangi penyebaran dengan pengetatan regulasi covid-19 seperti pada ketatnya pelayanan kesehatan, dibekukannya penerbangan antarnegara, serta PSBB jangka panjang. Tanpa disadari bahwa dampak dari kebijakan tersebut menyebabkan pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Barat selama covid-19 tahun 2020 mengalami penurunan.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah saran yang diberikan oleh penulis untuk Kabupaten Manggarai Barat:

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, diharapkan mampumengatasi masalah covid-19 lebih optimal seperti vaksinasi dan pelayanan prokes lainnya sehingga tempat wisata dapat dibuka dan

dikunjungi kembali. Dengan demikian penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat meningkat lagi.

- 2) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat, diharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat untuk dapat mengembangkan dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada sehingga tidak terlalu berpatokan dan mengharapkan pajak hotel, pajak restoran, ataupun pajak hiburan. Contohnya pengembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Supomo, dan Indrianto, Nur. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Barisa, W. 2020. *Adaptasi Usaha Mikro Kecil (UMKM) dimasa Pandemi Covid.19*. Jurnal Ilmiah Politik Kebijakan dan Ilmu Sosial
- Carunia, Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan PAD dalam Pembangunan Derah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Dhia Wenny, Cherrya. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ilmiah STIE MDP, Volume 2, No.1
- Farhan, Jauhari dan Radian. 2020. *Baitul Mal Dab: Tantangan Kemiskinan Dampak Covid-19 Melalui Perspektif Filsafat Hukum Islam*
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2008. *Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YPKN
- Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Memesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tugas Dan Wewenang Kepala Daerah
- Pemendagri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Dalam Proses Mengelola Keuangan Daerah diawali Dengan Penyusunan APBD

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Riyanto. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE

Rosidin, Utang. 2012. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia

Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YPKP

Sumarmoko. 2005. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Whitaker, James B. 1993. *The Government Performance and Result Act*. Online: [Http.kajian perencanaan/akuntabilitas](http://kajian.perencanaan/akuntabilitas).